

MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
1	Perencanaan Kinerja							
1	Memperjelas dan memfokuskan rumusan tujuan OPD agar tidak terlalu normatif, serta memastikan keterkaitan yang kuat dengan sasaran RPJMD dan IKU agar evaluasi AKIP menunjukkan kinerja yang lebih terukur, relevan, dan berdampak nyata.	1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengampu di Bapperida terkait penajaman rumusan Tujuan OPD dan keterkaitannya dengan sasaran RPJMD serta IKU 2. Menyusun, memutakhirkan, dan menyelaraskan tabel Renstra 2025-2029 sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Tabel Renstra 2025-2029	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 1.1 Tabel Renstra 2025-2029
2	Perlunya penajaman indikator kinerja, sehingga lebih jelas kondisi kinerja yang diharapkan.	1. Melakukan reviu dan penelaahan indikator kinerja dalam renstra untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi kinerja yang diharapkan 2. Menyempurnakan definisi operasional, formulasi pengukuran, sumber data dan interpretasi	SK IKU dan Definisi Operasional	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 1.2 SK IKU dan Definisi Operasional

3	Menurunkan pohon kinerja sampai level individu melalui integrasi dengan SKP dan cascading kinerja agar evaluasi AKIP lebih komprehensif, karena tidak hanya menilai capaian organisasi, tetapi juga kontribusi nyata dari setiap pegawai	Melakukan penjabaran pohon kinerja secara berjenjang sampai level individu melalui penyusunan cascading kinerja dan mengintegrasikannya ke dalam SKP sesuai tugas dan fungsi masing-masing pegawai	Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja Staf, SKP Staf	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 1.3	Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja Staf, SKP Staf
4	Memastikan realisasi triwulan tahun 2026 tersedia melalui monitoring yang ketat, kepatuhan pelaporan, dan integrasi rencana aksi dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan begitu evaluasi AKIP akan lebih konsisten dari tahun ke tahun dan tidak ada kesenjangan data yang mengurangi kualitas analisis.	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja secara triwulanan dengan memastikan ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian antara rencana aksi, pelaksanaan kegiatan, dan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi AKIP	Reviu Rencana Aksi per tri wulan	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 1.4	Reviu Rencana Aksi per tri wulan
5	Mempercepat penyusunan Renja Perubahan agar perencanaan OPD tetap konsisten dengan kebijakan pimpinan baru, sehingga evaluasi AKIP akan menunjukkan kesinambungan antara kepemimpinan, perencanaan, dan pelaksanaan program.	Menyusun Renja Perubahan 2026	Renja Perubahan 2026	Bulan Oktober 2026	Kepala Dinas	Dalam proses penyusunan	Sekretaris Dinas	LHE 1.5	Draft Renja Perubahan 2026

6	Memperkuat aspek legal dan administratif Tim SAKIP melalui penerbitan SK serta melengkapi dokumentasi pembahasan kinerja, sehingga evaluasi AKIP tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas kinerja OPD.	Menyusun dan menetapkan SK Tim SAKIP serta melaksanakan pembahasan dan evaluasi kinerja secara berkala yang didukung dengan notulen, daftar hadir, dan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan tugas Tim SAKIP	SK Tim SAKIP, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 1.6	SK Tim SAKIP, notulen rapat, daftar hadir dan dokumentasi
II	Pengukuran Kinerja								
1	Menyelaraskan indikator kinerja antara IKU Periode 2025 - 2029 dengan IKU tahun 2025 yang tersaji dalam LKj melalui harmonisasi dokumen, pedoman integrasi, dan koordinasi lintas unit, dengan begitu evaluasi AKIP akan lebih valid, konsisten, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel.	Melakukan reviu dan harmonisasi IKU periode 2025–2029 dengan IKU tahun 2025 yang tersaji dalam LKj melalui pemetaan keterkaitan indikator, formulasi, target, dan sumber data sebagai dasar pengukuran kinerja yang konsisten.	SK IKU dan Definisi Operasional	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 2.1	SK IKU dan Definisi Operasional
2	Menerbitkan SK Tim SAKIP Perangkat Daerah agar struktur kelembagaan evaluasi kinerja lebih lengkap dan sah secara administratif. Dengan adanya SK ini, evaluasi AKIP akan lebih kredibel dan akuntabel.	Menyusun SK Tim SAKIP	SK Tim SAKIP	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 2.2	SK Tim SAKIP

3	Mempercepat penyusunan Renja Perubahan perangkat daerah agar perencanaan tetap konsisten dengan kebijakan terbaru dan kebutuhan stakeholder. Dengan adanya Renja Perubahan, evaluasi AKIP akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil organisasi.	Menyusun Renja Perubahan 2026	Renja Perubahan 2026	Bulan September 2026	Kepala Dinas	Dalam proses penyusunan	Sekretaris Dinas	LHE 2.3	Draft Renja Perubahan 2026
III Pelaporan Kinerja									
1	Memperkuat kualitas LKjIP dan memperjelas integrasi antara informasi keuangan dengan capaian kinerja, sehingga laporan kinerja tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas yang transparan.	Mengintegrasikan informasi penggunaan dan realisasi anggaran dengan capaian kinerja dalam penyusunan LKjIP serta melakukan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran	Laporan Kinerja Tahun 2026	Bulan Februari 2027	Kepala Dinas	Akan ditindaklanjuti	Sekretaris Dinas		
IV Akuntabilitas Kinerja Internal									
1	Memastikan rekomendasi dalam LHE AKIP Internal benar-benar ditindaklanjuti dan diintegrasikan ke dalam perencanaan serta program kerja OPD agar evaluasi internal tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.	Menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2026 serta evidennya	Matriks tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2026 dan evidennya	Bulan Agustus 2026	Kepala Dinas	Selesai	Sekretaris Dinas	LHE 4.1	Matriks tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP Tahun 2026 dan evidennya



Painan, 24 Agustus 2026
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan

SYAMWIL, S.STP., MM.
NIP. 19820113 200112 1 003